

KEMUNDURAN DEMOKRASI DI INDONESIA: PENYEBAB, DAMPAK DAN SOLUSINYA DI ERA GLOBALISASI

Cesca Amelta¹, Endrilan Putra², Mayang Agustina³, M. Fikri Isnaini⁴, Vicko Ardiansyah⁵, Hamdi Abdullah Hasibuan⁶

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau

cesca.amelta0581@student.unri.ac.id¹, endrilan.putra3821@student.unri.ac.id²,
mayang.agustina0540@student.unri.ac.id³, m.fikri0586@student.unri.ac.id⁴,
vicko.ardiansyah3254@student.unri.ac.id⁵, hamdi.abdullah@lecturer.unri.ac.id⁶

Abstrak

Kemunduran demokrasi di Indonesia yang ditandai oleh meningkatnya politik identitas, lemahnya institusi demokratis, dan pembatasan kebebasan sipil. Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder dan kajian literatur untuk memahami fenomena ini secara mendalam, baik dari sisi normatif maupun empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang semakin ketat dalam membatasi kebebasan media dan suara kritis berkontribusi pada penurunan kualitas demokrasi. Selain itu, penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat dan Undang-Undang ITE memperburuk situasi kebebasan berekspresi. Penulis mengusulkan perlunya reformasi regulasi hukum dan lembaga demokrasi untuk memperbaiki kondisi ini dan menjaga stabilitas politik serta citra Indonesia di mata dunia internasional. Pendidikan politik juga dianggap penting untuk membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran demokratis dan kemampuan kritis dalam menghadapi tantangan yang ada.

Kata Kunci: Kemunduran Demokrasi, Kebebasan Sipil, Kualitas Pemerintahan, Kebebasan Media, Partisipasi Politik

Abstract

The decline of democracy in Indonesia is characterized by increasing identity politics, weak democratic institutions, and restrictions on civil liberties. This research uses secondary data analysis methods and literature review to understand this phenomenon in depth, both from a normative and empirical perspective. The research results show that increasingly stringent government policies in limiting media freedom and critical voices contribute to a decline in the quality of democracy. Apart from that, the implementation of Law Number 16 of 2017 concerning Community Organizations and the ITE Law worsens the situation for freedom of expression. The author proposes the need to reform legal regulations and democratic institutions to improve this condition and maintain political stability and Indonesia's image in the eyes of the international world. Political education is also considered important to form a young generation that has democratic awareness and critical abilities in facing existing challenges.

Keywords: Decline Of Democracy, Civil Liberties, Quality Of Governance, Media Freedom, Political Participation

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi merupakan sistem dan nilai politik yang paling banyak dianut oleh negara-negara berdaulat di dunia. Demokrasi bukanlah sistem yang kaku dan standar. Berbeda dengan sistem politik lainnya, salah satu keunggulan demokrasi adalah sifatnya yang dinamis, fleksibel, dan cenderung terbuka terhadap kritik dan perubahan. Namun karena sifat-sifat tersebut, suatu negara yang ingin menerapkan lembaga demokrasi harus melalui proses untuk memperoleh bentuk demokrasi yang sesungguhnya sesuai dengan kondisi dan karakteristik negara dan masyarakat.

Demokrasi sendiri pertama kali muncul di Yunani kuno, dimana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan pemerintah. Demokrasi Indonesia menghadapi banyak tantangan, salah satunya karena perubahan politik dan sosial yang cepat. Dengan memahami tantangan-tantangan ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperkuat demokrasi, Indonesia dapat melanjutkan perjalanannya menuju sistem politik yang lebih inklusif, transparan, dan tangguh.

Kemunduran demokrasi di Indonesia juga dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti meningkatnya politik identitas, lemahnya institusi demokratis, dan pembatasan kebebasan sipil. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada stabilitas politik dalam negeri, tetapi juga mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia internasional. Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kompleksitas persoalan yang menantang dan dapat menghambat demokrasi perlu dilakukan dengan segera, seperti mulai dari memaknai ulang konsep demokrasi Indonesia, memperbaiki sederet regulasi hukum, dan mereformasi lembaga-lembaga demokrasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah atau gambaran untuk memperoleh data kajian yang menjawab dari sebuah permasalahan yang dibahas. Pada penelitian ini, pembahasan kajian menggunakan metode analisis data sekunder dan kajian literatur yang melibatkan sumber-sumber akademis, serta hasil dari penelitian sebelumnya. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kemunduran demokrasi yang terjadi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena kemunduran demokrasi secara mendalam, baik dari sisi normatif (kerangka hukum dan peraturan) maupun empiris (praktik dan implementasi). Fokus dari penelitian ini adalah tentang kebebasan sipil, partisipasi politik, kualitas pemerintahan, dan kepercayaan publik.

PEMBAHASAN

Istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani kuno dan muncul di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Kata ini sering dianggap sebagai salah satu contoh pertama sistem yang terkait dengan hukum demokrasi kontemporer. Namun, arti istilah tersebut telah berubah seiring berjalannya waktu, dan definisi modernnya telah berkembang sejak abad ke-18, seiring dengan kemajuan sistem "demokratis" di banyak negara. Kata "demokrasi" mencakup dua komponen, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/cratein* yang berarti kekuasaan, sehingga dapat dipahami sebagai pemerintahan dari rakyat, disebut juga pemerintahan oleh rakyat, karena rakyat dan oleh pemerintah. semua orang. Konsep demokrasi telah menjadi istilah penting dalam ilmu politik. Hal ini wajar, karena demokrasi kini dianggap sebagai tolak ukur perkembangan politik suatu negara (Nihaya M, 2016).

Demokrasi memegang peranan penting dalam pemerataan kekuasaan dalam suatu negara (umumnya mengikuti konsep dan prinsip triad politik), dimana kekuasaan negara diambil dari rakyat untuk digunakan bagi kesejahteraan sosial. Penting sekali untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti trinitas politik karena sejarah menunjukkan bahwa besarnya kekuasaan pemerintah (eksekutif) seringkali tidak mampu menciptakan masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.

Begitu pula dengan kekuasaan yang berlebihan pada lembaga negara lainnya, seperti lembaga legislatif yang menetapkan anggaran gaji dan tunjangan anggotanya tanpa memperhatikan keinginan rakyat, tidak akan membawa manfaat apa pun bagi rakyat. Intinya,

setiap lembaga negara tidak hanya harus bertanggung jawab, namun juga harus ada mekanisme formal yang menjamin akuntabilitas setiap lembaga negara, dan mekanisme ini harus mampu membatasi kewenangan masing-masing lembaga negara secara operasional (tidak sekedar membatasi kewenangan) secara teoretis.

Sejak kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, UUD 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam proses kepemimpinan, presiden bertanggung jawab kepada MPR, lembaga yang dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, secara hierarki, rakyat seharusnya memegang kekuasaan negara melalui sistem perwakilan yang diperoleh melalui pemilu. Indonesia mengalami periode demokrasi yang singkat pada tahun 1956, ketika pemilihan umum bebas pertama diadakan, hingga Presiden Sukarno mendeklarasikan demokrasi terarah sebagai sistem pemerintahan pilihannya. Setelah mengalami demokrasi Pancasila, demokrasi palsu yang diciptakan untuk mempertahankan kekuasaan Suharto, Indonesia kembali ke demokrasi pada tahun 1998 ketika rezim militer Suharto runtuh. Pemilu demokratis kedua berlangsung pada tahun 2004 (Karima, Kaulan et al., 2023).

Dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang signifikan untuk muncul sebagai inti demokrasi di Asia, yang disebabkan oleh pencapaiannya dalam pengembangan dan pelaksanaan kerangka demokrasi. Pri Sulisto, Ketua Asosiasi Konsultan Politik Asia Pasifik (APAPC), menegaskan bahwa kemenangan Indonesia dalam domain demokrasi dapat berfungsi sebagai paradigma bagi berbagai negara Asia, beberapa di antaranya terus diatur secara otoriter. Lebih jauh lagi, Indonesia telah mengilustrasikan bahwa kemajuan demokrasi dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan pembangunan ekonomi. Dia berpendapat bahwa banyak pengamat eksternal, termasuk Asosiasi Konsultan Politik Internasional (IAPC), mengakui keberhasilan ini, menunjukkan bahwa pencapaian seperti itu patut diperhatikan. Pencapaian ini menandakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk menandai era baru, lebih demokratis dan makmur di Asia (Wahid, 2012).

Dalam kesempatan ini, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, yang biasa disebut sebagai SBY, dianugerahi medali demokrasi yang bergengsi. SBY menguraikan secara komprehensif lintasan demokrasi di Indonesia. Dia mengemukakan bahwa paradigma demokrasi di Indonesia mengatasi ketidakpastian seputar proses demokrasi di dalam negeri. Dia merujuk berbagai skeptis yang muncul mengenai evolusi demokrasi Indonesia. Pertama, ada asumsi bahwa demokrasi dapat menimbulkan kekacauan dan fragmentasi. Beberapa kritikus menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia mungkin hanya memuncak dalam transisi rezim dan dapat memperburuk ekstremisme dan radikalisme politik.

Dia lebih lanjut menegaskan bahwa pengalaman demokrasi Indonesia mencontohkan kompatibilitas Islam dengan modernitas. Selain itu, terlepas dari pergolakan besar setelah transisi empat presiden antara tahun 1998 dan 2002, demokrasi di Indonesia telah menghasilkan stabilitas politik di samping pertumbuhan ekonomi yang menonjol. Selain itu, Indonesia kini telah naik ke status negara demokratis terbesar secara global, berhasil melakukan proses pemilihan yang rumit. Meskipun skeptisisme awal mengenai kelangsungan hidup demokrasi di Indonesia lazim, kenyataannya tetap bahwa demokrasi di Indonesia kini telah mencapai satu dekade keberadaan dan terus berkembang. Secara historis, beberapa orang berspekulasi bahwa demokrasi akan goyah di Indonesia, karena penduduknya dianggap kurang siap. Ada juga argumen yang menunjukkan bahwa ukuran Indonesia dan tantangan yang rumit membuat demokrasi tidak layak. Kekhawatiran semacam itu menggemakan kekhawatiran yang berpotensi membatasi Indonesia dalam keadaan kacau, berisiko fragmentasi.

Tantangan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia lebih cenderung dinikmati oleh orang-orang dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang memadai. Bagi kelompok ekonomi bawah, dampak positif dari demokrasi terhadap perekonomian mereka masih belum terlihat jelas. Inilah tantangan yang dihadapi. Perubahan harus dijalani saat memasuki periode transisi. Demokrasi masih sering dikaitkan dengan isu yang lebih menguntungkan kaum elit, namun nyatanya ekonomi menjadi persoalan sesungguhnya yang dihadapi oleh kaum ekonomi bawah dan belum sepenuhnya tersentuh dalam upaya demokratisasi.

Saat ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan yang sangat berat. Demokrasi sesungguhnya berkaitan dengan penghormatan hak asasi manusia. Oleh karena itu, fitrah tersebut perlu dikelola dengan baik untuk menghasilkan hasil yang optimal. Tiap individu mempunyai haknya masing-masing. Untuk bertukar pikiran, bersilahturahmi, bergabung, dan aktif dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, demokrasi pada umumnya butuh peraturan yang jelas peraturan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan juga dalam hukum undang-undang dan peraturan pemerintah.

Dalam periode transisi, keberlangsungan demokrasi tanpa kehadiran potensi manusia yang handal akan membuka pintu bagi campur tangan unsur asing dalam menyusup dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini merupakan sebuah tantangan yang cukup berat di tengah-tengah perkembangan demokrasi. Dampak dari kehadiran asing akan lebih menguntungkan pihak mereka daripada memberikan manfaat bagi Indonesia. Pengaruh dominan dari luar malah dapat meredam semangat demokrasi itu sendiri dengan tidak memberikan ruang bagi keberagaman pendapat yang seharusnya ada. Menguntungkan bagi Indonesia adalah bila standar ganda dari pihak asing juga bisa menjadi faktor yang membuat demokrasi di Indonesia terhambat.

Harapan dari perkembangan demokrasi yang sedang berlangsung adalah hal tersebut memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan negara. Selain itu, diharapkan bahwa demokrasi akan mampu melahirkan pemimpin yang lebih memperhatikan kepentingan banyak rakyat, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan. Tak hanya itu, diharapkan bahwa demokrasi dapat menjadi pilar kekuatan negara. Demokrasi dalam negara yang tidak stabil akan melalui fase transisi yang berkepanjangan ini sangat merugikan bagi bangsa dan negara. Demokrasi yang berkembang di negara kuat seperti Amerika, akan membawa manfaat yang positif bagi seluruh warga negara. Di sisi lain, demokrasi di negara berkembang seperti Indonesia yang tidak menghasilkan negara yang kuat akan sulit memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Negara yang kuat tidak selalu diidentikkan dengan otoritarianisme bahkan pengagungan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan militer (Nihaya M, 2016).

Meskipun demokrasi Indonesia mungkin menghadapi banyak tantangan, namun peneliti yakin masih ada harapan untuk meningkatkan keadaan ini. Sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak demokrasi, organisasi masyarakat dan sipil di Indonesia tetap gigih melawan otoritarianisme untuk mendorong partisipasi politik yang inklusif. Langkah-langkah ini menawarkan harapan bahwa demokrasi di Indonesia dapat diperkuat kembali dengan dukungan luas dari masyarakat dan komunitas internasional. Mencoba bangkit dari kondisi kemunduran demokrasi di Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Dengan kekayaan kekuasaannya, pemerintah kemungkinan besar akan menolak segala upaya yang dilakukan untuk memperkuat kembali lembaga-lembaga demokrasi dan hak-hak sipil masyarakat. Peneliti mengajak semua pihak yang peduli dengan masa depan demokrasi di Indonesia untuk bekerja sama melalui pendidikan, advokasi, lembaga masyarakat, atau partai politik guna menghadapi tantangan yang akan datang.

Perubahan pada Undang-Undang Pemilu dan kebijakan untuk menjamin kebebasan sipil adalah langkah penting yang perlu diambil dengan segera. Perlu ditingkatkan pula sistem pemantauan pemilu, perlindungan terhadap media dan kebebasan berekspresi, serta pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak terlalu dominan dalam proses politik sebagai upaya yang harus dilakukan. Indonesia berada di ambang bahaya menuju pemerintahan otoriter yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, jika tidak dilakukan langkah perubahan yang signifikan dan menyeluruh (Febriandy & Wahid, 2024).

Penyebab Kemunduran Demokrasi di Indonesia

Kualitas demokrasi Indonesia pada sepuluh tahun terakhir ini mengalami penurunan yang lumayan drastis. Hal tersebut membuat perhatian seluruh dunia yang mana cukup mengkhawatirkan karena banyaknya negara-negara yang mengalami kesulitan dalam menjalankan demokrasi. Penurunan tersebut menjadi semakin jelas saat adanya laporan demokrasi dari V-Dem Institute tahun 2024 yang dimana mencap Indonesia sebagai sebuah

negara otokrasi electoral (Febriandy & Wahid, 2024). Hal tersebut membuat peringkat Indonesia bergeser yang sebelumnya merupakan negara demokrasi elektoral menjadi negara otokrasi elektoral. Penurunan tersebut terjadi karena menurunnya kebebasan dalam berekspresi, terjadinya degradasi dalam kualitas pemilihan umum, banyak terdapat kegiatan money politics, dan kebijakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat (Hilmy, 2020).

Salah satu penyebab mundurnya demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari menurunnya kebebasan sipil. Sebagai salah satu fondasi demokrasi, kebebasan berekspresi semakin terdesak karena kebijakan pemerintah yang semakin ketat dalam membatasi kebebasan kepada media dan membungkam suara-suara kritis yang ada (Sara et al., 2024). Salah satu contoh negara yang paling mencolok dalam fenomena ini adalah Indonesia, akan tetapi Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami fenomena tersebut. Dalam hal ini Indonesia mewakili tren yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia yang di mana kebebasan sipil mengalami penurunan sangat drastis. Penurunan kebebasan yang terjadi di Indonesia ini dapat dilihat dalam freedom house. Freedom house mencatat bahwa dari tahun 2013 kebebasan di Indonesia mengalami penurunan yang sebelumnya Indonesia berstatus bebas (free) sekarang menjadi bebas sebagian (partly free). Freedom house (2014) juga melaporkan bahwa menurunnya demokrasi di Indonesia saat ini disebabkan oleh banyaknya regulasi-regulasi yang samar, multi-tafsir, atau biasa disebut dengan "pasal karet" (Nurrohman et al., 2024).

Dengan banyaknya regulasi-regulasi yang bersifat karet ini, maka yang terjadi adalah masyarakat menjadi takut dalam mengemukakan pendapat. Fenomena ini terjadi di Indonesia yang mana rakyat membuat sebuah kritikan terhadap Indonesia dengan sebuah konotasi negara "konoha" dan "wakanda". Hal ini menjadi sebuah bukti bahwa pada saat ini ada rasa takut dan khawatir bagi masyarakat dalam kebebasannya untuk mengemukakan pendapat dan berekspresi. Dari hal tersebut, tentu faktor dari kebebasan berpendapat, berekspresi, media, dan pers perlu dibenahi agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan dengan baik.

Penyebab lain dari mundurnya demokrasi yang ada di Indonesia yaitu karena lahirnya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penolakan dari masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Menurut Rosmala, kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat akan ditolak oleh rakyat, jika penolakan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut terjadi terus-menerus, itu menjadi sebuah pertanda menurunnya demokrasi karena dapat disimpulkan bahwa pemerintah mengabaikan aspirasi-aspirasi yang dikemukakan oleh rakyat. Konsep dari demokrasi perwakilan ini memang lumayan efektif dilakukan di negara Indonesia mengingat besarnya populasi penduduk serta besarnya wilayah di Indonesia.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya demokrasi perwakilan ini sangat jauh dari kata sukses. Hal tersebut dapat dilihat dari terciptanya kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat emosi dan banyaknya penolakan dimana-mana karena tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Padahal jika kebijakan yang dibuat oleh dewan perwakilan ini benar-benar sesuai dengan kepentingan rakyat dan berjalan dengan baik tentunya tidak akan ada penolakan yang terjadi di masyarakat. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan harus dibenahi karena ini memiliki banyak sangkutannya dengan permasalahan-permasalahan yang lain.

Melihat dari masalah-masalah yang terjadi, dapat digambarkan bahwa demokrasi yang saat ini terjadi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Selain itu, menurut Economist Intelligence Unit (EIU), dalam laporan indeks pada tahun 2021, Indonesia termasuk kedalam kategori negara demokrasi yang cacat (Jati, 2021). Pastinya hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat. Sebab, jika demokrasi yang terjadi di Indonesia tidak baik-baik saja maka akan susah untuk melahirkan para pemimpin yang baik dan kompeten untuk Indonesia kedepannya. Padahal untuk menjadi seorang pemimpin yang dipilih berdasarkan demokrasi, harusnya seorang pemimpin yang mengerti dengan keadaan yang ada di Indonesia dan memiliki gagasan yang bagus untuk menciptakan kemajuan di Indonesia dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada.

Dampak Kemunduran Demokrasi di Indonesia

Dalam rentang waktu 10 tahun belakangan telah terjadi kemunduran ataupun penurunan pada kualitas demokrasi yang dapat dikatakan cukup drastis. Salah 1 hal utama yang menandai terjadinya penurunan pada kualitas demokrasi di Indonesia ialah adanya penurunan kebebasan sipil. Menurut Repucci & Amy (2021) kebebasan berekspresi merupakan salah satu pilar dari demokrasi, munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang semakin ketat dalam membatasi kebebasan media serta pembungkaman terhadap suara suara kritis berakibat pada penurunan hak sipil dalam kebebasan berekspresi (Febriandy & Wahid, 2024).

Melemahnya hak sipil dalam kebebasan berekspresi di Indonesia dapat kita lihat dari beberapa hal berikut, yang pertama ialah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Ormas pada 2017 atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Salah satu prinsip Negara dengan sistem Demokrasi seperti Indonesia adalah adanya kebebasan berorganisasi dan berserikat seperti yang tercantum dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945, namun kemunculan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ini justru memberikan batasan atas kebebasan tersebut, dengan alasan ancaman kemanan atau keadaan mendesak dan genting (Ardi, 2019).

Selanjutnya penurunan kebebasan berekspresi yang dibatasi oleh kebijakan pemerintah juga ditunjukkan pada Pasal pencemaran nama baik pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang sering kali dimanfaatkan untuk menjerat, mengadili, serta menghukum bermacam orang seperti jurnalis, bahkan seorang akademisi yang memberikan kritik terhadap kebijakan Universitas sekalipun dilaporkan atas pencemaran nama baik ini. Berdasarkan data Tim Redaksi (2023) selama tahun 2022 UU ITE digunakan setidaknya sebanyak 37 kasus pelanggaran atas kebebasan berekspresi yang mana terdapat korban sebanyak 46 orang, yang mana 11 diantaranya tersebut berdasarkan hasil patroli polisi virtual (Wiranata et al., 2023).

Kemunduran demokrasi ini tentunya memberikan dampak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada HAM, kebebasan pers, serta partisipasi masyarakat dalam proses politik. Berdasarkan data Freedom House, indeks demokrasi negara Indonesia mengalami penurunan, pada Tahun 2019 62 poin kemudian menjadi 53 poin pada tahun 2023. Selain itu penurunan kebebasan pers juga ditunjukkan dalam data Reporters Without Borders (RSF) yang mengalami penurunan, pada Tahun 2019 dengan 63,23 poin menjadi 54,83 poin pada 2023. Menurut Power & Warburton (2020) kemunculan kebijakan kebijakan serta regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi tersebut tentunya berakibat pada menurunnya kebebasan pers di Indonesia yang akhirnya berdampak pada penurunan kualitas informasi yang diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang buruk dalam membuat penilaian politik yang bijak (Febriandy & Wahid, 2024).

Stabilitas sosial serta ekonomi di Indonesia turut terkena dampak dari kemunduran demokrasi di Indonesia, adanya pembatasan kebebasan berekspresi dan politik mampu memicu terjadinya konflik sosial. Selain itu, negara dengan kondisi politik yang tidak stabil cenderung akan dihindari oleh investor yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesenjangan sosial. Oleh sebab itu kemunduran demokrasi di Indonesia harus segera di atasi dan keluar dari kondisi yang mengkhawatirkan ini agar tidak membawa Indonesia kepada kondisi yang lebih buruk lagi.

Solusi Terciptanya Demokrasi yang Baik

Adapun solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengembalikan demokrasi di Indonesia yang mengalami kemunduran dengan beberapa cara. Salah satunya kita mulai dari generasi muda yang selanjutnya akan meneruskan estafet pemerintahan dimasa yang akan datang. Jika kita lihat sumbangsih pemuda yang diharapkan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa pemuda harus memiliki bekal pendidikan politik untuk menjaga demokrasi Indonesia yang sehat. Pendidikan politik dapat menjadi jalan untuk menjaga demokrasi seperti yang di cantumkan pada UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 1. Diharapkan solusi tersebut bisa menjadi senjata paling ampuh untuk membentuk negarawan yang bermoral, memiliki jiwa kepemimpinan serta kontrol sosial terhadap rakyat.

Jikalau pendidikan politik di terapkan dengan baik oleh pemerintah atau penyelenggara pendidikan mulai dari pendidikan rendah hingga ke pendidikan tinggi, bisa dipastikan bertumbuhnya kekuatan demokrasi yang positif dan kemampuan kritis dalam menghadapi kondisi yang tidak sehat dalam hal bernegara (Sanusi & Sofyan, 2020).

Selain dari pendidikan politik di atas, usaha yang dapat kita sama-sama lakukan selaku penegak hukum diperlukan adanya reformasi dalam hal penegakan hukum, terutama pada kepolisian dan kejaksaan, mengencangkan keikutsertaan masyarakat dalam proses hukum dan pemerintah wajib memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap rakyat atau seorang yang melaporkan jika terdapat pelanggaran konstitusi agar mereka tidak lagi dibayang-bayangi oleh kekhawatiran pasca membuat laporan. Adapun solusi lain dengan cara memberikan ruang untuk akademisi dan praktisi hukum untuk mengkaji konstitusi yang akan di buat sehingga tidak lagi menimbulkan rasa ketidakadilan. Hukum sudah sepatutnya dijalankan hanya berdasarkan logika saja, namun dengan perasaan, kepedulian dan semangat keterlibatan kepada negara kita yang dirasa sedang menderita.

Hukum seharusnya berfungsi sebagai institusi yang menjadikan negara kita menjadi bahagia dan sejahtera. Selama ini hukum yang dicapai hanya sebagai keadilan dari sudut pandang spiritual hukum, moral hukum dan sosial hukum saja, tetapi belum secara menyeluruh tegas untuk menyentuh pada filosofi dan legal hukum yang diharapkan bisa menjadi jembatan penganut paham hukum doctrinal dan non doctrinal. Lain daripada itu solusi supaya terwujudnya keadilan yang kita harapkan secara ilmu pemahaman dan filosofis, yaitu dengan tetap berpedoman atau berpatokan pada Pancasila dan pembukaan UUD 1945 yang mengandung visi dan misi bangsa negara Indonesia (Susilo, 2011).

KESIMPULAN

Degradasi demokrasi di Indonesia bisa dilihat mulai dari penurunan kebebasan sipil, meningkatnya politik identitas dan melemahnya institusi demokrasi. Peraturan pemerintah yang semakin mengikat dalam hal membatasi kebebasan media dan berfikir kritis atau suara kritis berkontribusi signifikan dalam penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Hal itu membuat semakin buruk kebebasan berekspresi yang menyebabkan banyak sekali individu termasuk juga jurnalis dan akademisi yang terjerat kasus pencemaran nama baik. Pada penelitian ini juga menekankan sudah seharusnya ada reformasi regulasi guna memperbaiki lagi kondisi ini dan menjaga stabilitas demokrasi dan politik.

Pendidikan politik dipandang penting untuk membentuk dan membangun generasi penerus bangsa yang memiliki sikap kesadaran demokrasi yang baik dan kemampuan kritis dalam menanggapi tantangan kedepannya. Dengan cara yang tepat diharapkan demokrasi khususnya di Indonesia bisa di perkuat dan berkembang ke arah yang lebih positif. Perubahan pada undang-undang Pemilu dan peraturan untuk menjamin adanya kebebasan sipil adalah langkah penting yang harus diambil pemerintah. Secara umum degradasi atau kemunduran demokrasi di Indonesia harus cepat di atasi supaya tidak membawa negara ke keadaan yang lebih buruk, yang akan bisa membuat stabilitas social, ekonomi dan kepercayaan publik berdampak juga. Peran pemerintah juga sangat penting dan harus sejalan dengan masyarakat sipil dan individu guna menghasilkan lingkungan serta budaya demokrasi yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, A. (2019). *Dampak Undang-Undang Ormas Terhadap Kebebasan Organisasi Bagi Ormas Islam Di Provinsi Lampung (Studi Kasus Dpw Fpi Kota Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Febriandy, R. K., & Wahid, U. (2024). Kemunduran Demokrasi Di Indonesia: Analisis Laporan Varieties of Democracy (V-Dem) Institute 2024. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 7(2), 1041–1050. <https://doi.org/10.31539/KAGANGA.V7I2.12392>
- Hilmy, M. I. (2020). Fenomena Gerakan Populisme Dalam Kemunduran Demokrasi. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 145–156. <https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13080>
- Jati, W. R. (2021). Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021. *The Habibie Center THC Insights*, 27, 6. www.habibiecenter.or.id

- Karima, Kaulan, M., Rais, Damara, Dinda, S., Harahap, Hasanah, P., Daulay, Ana, F., Pratiwi, E., Siagian, Izzati, Z., Sitompul, Sarma, B., Siagian, Nani, N., Alfitriyani, N., & Sabrina, T. (2023). Perjalanan Demokrasi Indonesia dan Problematikanya. *Jurnal Educandumedia*, 2(1), 104–111.
- Nihaya M, H. (2016). Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 10(2), 15–25.
- Nurrohman, R., Nugroho, F. R., Tiastiwi, U. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). *Analisis Permasalahan Penerapan Demokrasi dan Prospek Perbaikannya di Indonesia*. 1(1), 11–20.
- Power, T., & Warburton, E. (2020). *Democracy In Indonesia From Stagnation To Regression?* ISEAS – Yusof Ishak Institute.
- Repucci, S., & Amy, S. (2021). Democracy under Siege. *Freedom House*, 2, 1–12.
- Sanusi, A. R., & Sofyan, F. S. (2020). Implementasi pendidikan politik Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Karawang dalam menumbuhkan pemahaman nasionalisme generasi muda Nahdhatul Ulama. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(2), 185–194.
- Sara, D., Lumbantoruan, R. R., Fitri, N., Perdana, R., & Pangestoeti, W. (2024). Terjadinya Penyempitan Ruang Demokratis Di Indonesia Yang Makin Menguat Gejalanya Di Masa Pandemi. *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran, Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 1–8.
- Susilo, A. B. (2011). Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum (Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia). *Perspektif*, 16(4), 214–226. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.449-470>
- Wahid, A. (2012). Politik Legislasi Menentukan Demokrasi (Analisis Putusan No. 15/PUU-IX/2011). *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 163–188.
- Wiranata, Khamim, M., & Asmarudin, I. (2023). Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital dan Penerapannya Di Indonesia. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 205–218.